

FRANZ MAGNIS-SUSENO

DEMOKRASI

TANTANGAN UNIVERSAL

Tuntutan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan secara demokratis merupakan salah satu keyakinan inti **etika politik modern**. Padahal "**demokrasi**" dalam arti modern merupakan bentuk kenegaraan yang sangat baru dan anak kebudayaan Eropa bagian Barat. Tidak mengherankan bahwa klaim demokrasi sebagai satu-satunya bentuk kekuasaan politik yang sah menjadi bahan perdebatan, terutama di Asia dan Afrika. Apakah klaim demokrasi memang berlaku universal atau sebenarnya hanya mencerminkan bias etnosentris Barat? Dalam karangan ini saya mau menanggapi pertanyaan ini.

MENGHERANKAN

"Dua setengah ribu tahun yang lalu negara kota Yunani kecil Athena menemukan bentuk pemerintahan politik baru. Sekarang nama bentuk pemerintahan itu merupakan satu-satunya dasar legitim atasnya dapat diklaim wewenang politik yang biasa dan lestari di seluruh dunia." Pernyataan di sampul salah satu buku baru tentang demokrasi ini¹ dengan ringkas meng-

ungkapkan suatu kenyataan yang cukup mengherankan: pada akhir abad ke-20 demokrasi mengklaim menjadi sistem kekuasaan politik satu-satunya yang sah.

Mari kita kesampingkan untuk sementara pertanyaan apakah klaim ini dapat dipertahankan berhadapan dengan sekian banyak klaim lawan dan, lebih mendesak lagi, berhadapan dengan kenyataan bahwa sukses demokrasi dalam kebanyakan negara di luar negara-negara "Barat" masih dipertanyakan, dan mari kita merefleksikan dulu betapa mengherankan sebenarnya kenyataan ini.

Dilihat secara dangkal, barangkali dominasi legitimatif global demokrasi tidak kelihatan begitu aneh. Umumnya diterima bahwa tanpa memakai teknologi Barat tak mungkin suatu pembangunan maupun kekuatan nasional dapat diharapkan akan tercapai. Maka orang barangkali mengatakan bahwa mengingat negara-negara Barat berupa demokrasi, demokrasi nampaknya bentuk kekuasaan politik yang tepat. Akan tetapi, tentu saja cara berargumentasi ini tidak sangat meyakinkan. Di Barat saja teknologi modern tidak berkembang semata-mata di bawah kondisi-kondisi demokratis. Dan tidak kelihatan ada alasan mengapa modernisasi harus dikaitkan dengan bentuk pengorganisasian politik negara tertentu. Mungkin saja bahwa demokrasi Barat tidak lebih daripada salah satu model pengorganisasian kekuasaan politik yang modern.

Akan tetapi ternyata lain perkembangnya. Saya mengutip Robert A. Dahl: "Dalam abad ke-20 gagasan demokrasi bukan lagi, seperti sebelumnya, sebuah ajaran parokial yang hanya dianut di Barat oleh persentase kecil bangsa-bangsa dunia dan yang direalisasikan selama beberapa abad saja di sebagian amat kecil bumi. Meskipun masih jauh dari suatu kemenangan di seluruh dunia, dalam setengah abad terakhir demokrasi dalam arti modern memperoleh kekuatan hampir universal sebagai idea politik, sebagai sebuah aspirasi, dan sebuah ideologi."²

Hanya seratus tahun lalu Anda dapat menghitung negara-negara demokratis dengan jari keduabelah tangan. Selama ribuan tahun bangsa-bangsa di seluruh dunia, di Barat maupun di Timur, dengan kekecualian beberapa kota Yunani lebih dari 2000 tahun lalu dan beberapa kota Italia selama Abad Pertengahan Eropa, puas-puas saja dengan monarki atau aristokrasi atau kekuasaan kepala suku atau bentuk pemerintahan mereka apa pun. Sepatah kata pun tidak ditulis tentang demokrasi atau kedaulatan rakyat. Akan tetapi secara mendadak, dalam abad ini, dan lebih-lebih sesudah negara-negara jajahan mengusir para penindas kolonial mereka, datanglah demokrasi dengan klaimnya yang universal dan nampaknya tak ada yang dapat lari daripadanya.³ Yang aneh, siapa pun, di Asia maupun di mana pun, tidak dapat meremehkan klaim demokrasi [demokrasi tidak dapat dilupakan seperti sesudah kekuasaan ko-

lonial runtuh, anak-anak Indonesia berhenti menghafalkan sungai-sungai negeri Belanda]. Bukan seakan-akan semua merangkul gagasan demokrasi. Fahaman demokrasi masih dipertanyakan dan ditantang dalam banyak negara bukan Barat. Namun yang menarik: kritik macam itu, dengan beberapa kekecualan saja, tidak pernah mengenai gagasan demokrasi itu sendiri, melainkan selalu mengenai bentuk-bentuk demokrasi tertentu, terutama yang disebut "demokrasi Barat" atau "liberal" apa pun dimaksud dengan istilah itu. Atau dikatakan, seperti baru saja oleh Presiden Tajikistan, bahwa demokrasi Barat tidak cocok dengan negaranya dan bahwa Tajikistan akan membutuhkan lebih dari seratus tahun untuk menjadi demokrasi. Jadi meskipun demokrasi ditolak untuk sekarang, Presiden Tajikistan bertolak dari pengandaian diam-diam bahwa pernah negaranya pun harus, dan kiranya akan, mejadi sebuah demokrasi. Hampir tak pernah ada yang misalnya mengatakan bahwa "biar ada negara-negara demokratis, akan tetapi kami mempunyai bentuk pemerintahan sendiri yang tidak demokratis dan tidak peduli dengan demokrasi", ucapan mana andaikata kita biasa dengannya malah masuk akal.

KLAIM DEMOKRASI

Izinkanlah saya uraikan sedikit apakah implikasi klaim demokrasi atas legitimasi politik eksklusif. Klaim itu mengandung klaim bahwa demokrasi adalah "satu-satunya dasar legitim atasnya dapat diklaim wewenang politik yang biasa dan lestari

di seluruh dunia."⁴ Ini menuat klaim bahwa resim-resim tidak demokratis tidak memiliki legitimitas kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dan untuk waktu terbatas, tetapi tidak sebagai sesuatu yang biasa dan lestari. Satu-satunya bentuk pemerintahan yang secara positif dapat diterima - positif dalam arti: kecuali dalam situasi dan kondisi khusus - mestinya demokrasi. Negara-negara tidak demokratis akan harus dikritik. Resim-resim non-demokratis akan memiliki legitimasi yang kurang. Mengingat mayoritas negara-negara dalam PBB dianggap bukan demokrasi, pernyataan ini memang berbunyi luar biasa.

Dan kita harus memperhatikan bahwa klaim demokratis ini merupakan klaim moral. Demokrasi menklaim legitimitas universal sebagai prinsip etika politik. Sebagai itu kerangka acuannya adalah martabat manusia. Demokrasi diklaim sebagai satu-satunya bentuk kekuasaan politik modern yang sah karena ia dianggap satu-satunya bentuk pemerintahan yang sesuai dengan martabat para warga negaranya sebagai manusia. Dalam kondisi-kondisi modern kekuasaan politik harus demokratis demi hormat terhadap martabat rakyatnya sebagai manusia. Pemerintahan bukan demokratis dipandang bertentangan dengan martabat kemanusiaan mereka.

Itulah klaim universal demokrasi. Mohon diperhatikan bahwa saya tidak, atau belum, mengatakan bahwa klaim itu benar. Saya hanya mengeja implikasinya.

MEMPERTANYAKAN KLAIM DEMOKRASI

Selama mereka memperjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial, banyak pemimpin dunia ketiga menjunjung tinggi demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang paling diminati. Akan tetapi hanya sedikit negara bekas jajahan kemudian mengadakan demokrasi, dan di mana demikian, seperti misalnya di Indonesia, demokrasi sering gagal. Satu-satunya kekecualian barangkali India, Sri Lanka dan Malaysia. Makin lama makin menjadi jelas bahwa demokrasi hanya dapat berhasil di mana prakondisi-prakondisi politik, sosial, kultural dan kiranya juga ekonomis tertentu, terutama menyangkut "stabilitas", terdapat dan bahwa penciptaan mekanisme-mekanisme demokratis tidak merupakan obat mujarab pemecahan segala macam masalah politik, sosial dan ekonomis.

Di lain pihak, apabila kita memperhatikan negara-negara yang lazimnya dianggap sukses di Asia Timur, kita mendapat kesan bahwa stabilitas sosial dan pembangunan ekonomis dapat diciptakan dengan mulus di bawah resim-resim otoriter, sedangkan pelbagai usaha demokratis, misalnya di Pakistan atau Bangladesh, tidak menghasilkan stabilitas yang diharapkan.

Maka meskipun prinsip demokratis sendiri pada umumnya tidak disangsikan, akan tetapi klaim bahwa legitimitas politik hanya dapat diperoleh melalui demokrasi, atau, lebih tepat, bahwa semua negara, supaya secara etis dapat diterima,

harus mewujudkan atau mengaktifkan institusi-institusi demokratis secara luas ditolak sebagai etnosentrisme, dan oleh karena itu salah, oleh pemimpin-pemimpin dan pemikir-pemikir politik di negara-negara non-Barat. Mereka secara luas menolak tuduhan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan bukan demokratis mesti bertentangan dengan martabat kemanusiaan masyarakat-masyarakat mereka.

Barangkali diskusi sekitar demokrasi yang sedang berlangsung dapat digambarkan sebagai berikut: Nampaknya ada dua trend yang saling bertentangan pada waktu yang sama: Di satu pihak prinsip -sangat modern- bahwa pemerintahan harusnya demokratis jarang ditentang secara langsung; bahkan barangkali dapat dikatakan bahwa meskipun ada begitu banyak pengalaman dan debat yang bertentangan, prinsip ini diterima secara hampir universal. Akan tetapi di lain pihak, klaim bahwa negara-negara bukan demokratis secara implisit melanggar martabat manusia para warga negara mereka dan bahwa, oleh karena itu, demokrasi harus segera diwujudkan, secara luas ditolak dan dituduh sebagai berat sebelah pro-Barat [lepas dari kecurigaan bahwa tuntutan demokratisasi melayani kepentingan masif politik Barat].

Oleh karena itu saya ingin mengajukan *pertanyaan-pertanyaan* berikut: Bagaimana halnya klaim universal dan eksklusif demokrasi atas legitimitas berhadapan dengan kenyataan bahwa demokrasi, dalam bentuk modern, merupakan produk

tradisi Eropa-Amerika Utara atau "Barat"? Dapatkah demokrasi, anak sebuah lingkungan sosial dan kultural spesifik, yaitu yang Barat, diharapkan menjadi ungkapan utama kedewasaan politik dalam negara-negara dengan lingkungan sosial yang sangat berbeda? Dapatkah demokrasi menjadi ekspresi politik berlembaga sikap hormat terhadap martabat manusia dalam negara-negara bukan Barat?

DEMOKRASI MODERN

Perkenankanlah saya menambah beberapa catatan tentang demokrasi. Dalam karangan ini saya memahami demokrasi dalam arti modern, sebagai sistem politik yang melembagakan kontrol terhadap pemerintah oleh rakyat serta kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat (accountabilitynya) melalui sebuah sistem perwakilan. Jadi demokrasi modern adalah dua hal sekaligus: Ia mau membuat nyata kedaulatan rakyat, dan ia melakukannya melalui suatu sistem kompleks lembaga-lembaga yang mengoperasionalisasikan kedaulatan rakyat.

Yang penting adalah bahwa demokrasi secara hakiki lebih daripada sekedar kedaulatan rakyat. Demokrasi juga merupakan jaringan kompleks institusi-institusi. Itu berarti dua hal. Pertama, bukan setiap pemerintah atau bentuk pemerintahan yang diterima oleh rakyat, jadi yang dalam arti ini mengungkapkan kedaulatan rakyat, merupakan demokrasi. Pemerintahan diktatorial populistik lunak seorang pemimpin besar

dapat saja diterima baik oleh rakyat, bahkan bisa merupakan bentuk pemerintahan terbaik bagi bangsa itu, akan tetapi dia bukan sebuah demokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang dilembagakan melalui mekanisme-mekanisme politik dan hukum yang pada umumnya dikaitkan dengan demokrasi.

Kedua, demokrasi (dalam arti ini) tidak pernah mengklaim bahwa dia dalam kenyataan merupakan "pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", meskipun Abraham Lincolnlah yang membentuk kalimat termasyur itu. Dalam demokrasi representatif modern para warga negara sangat sedikit terlibat dalam pemerintahan. Klaim-klaim demokrasi jauh lebih terbatas. Klaimnya tidak lebih daripada bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk, memang bentuk terbaik!, penginstitutionalisasian kontrol maksimum para warga negara terhadap pemerintah mereka serta maksimum kewajiban per tanggungjawaban pemerintah terhadap para warga negaranya, dan itu atas dasar yang mantap, lestari, berlembaga dan yudisial. Tidak pernah demokrasi menklaim bahwa para warga negara dapat langsung mempengaruhi perundangan (sebagaimana dituntut Rousseau) atau bahwa perundangan selalu sesuai dengan apa yang disetujui oleh mayoritas. Hal itu selalu dilihat dan diterima sebagai akibat tak terelakkan prinsip perwakilan yang sendiri diterima sebagai satu-satunya jalan untuk menerjemahkan cita-cita demokratik kedaulatan rakyat ke dalam realitas politik tetap. Yang diklaim adalah bahwa tidak

ada bentuk pemerintahan lain yang menawarkan, dengan kadar yang sama atau hampir sama, tingkat kontrol terhadap pemerintah, dan accountability pemerintah itu terhadap rakyatnya yang sama besarnya atas dasar jangka panjang, lembaga, dengan tidak tergantung dari ketrampilan dan kualitas moral orang, atau orang-orang yang kebetulan memimpin pemerintah. Saya perlu menekankan hal ini untuk menanggapi sangkalan yang tidak terlalu cerah bahwa dalam demokrasi pun pemerintahan adalah urusan sebuah elit. Tentu saja demikian dan memang harus demikian. Yang mentukan adalah bahwa dalam demokrasi, dan hanya dalam demokrasi, elit-elit dipaksa untuk memperlihatkan diri kepada para warga negara dan para warga negara berkuasa untuk membuang elit yang berkuasa dan memilih sendiri elit mana yang mereka kehendaki memerintahi mereka, dan mereka berhak untuk bicara apa yang mereka pikirkan dan tidak ada partai politik yang berani mengabaikan pendapat mereka.

Demokrasi diakui umum sebagai sistem politik di mana sejumlah ciri dan kondisi harus terpenuhi. Saya merangkum kondisi-kondisi itu dalam apa yang saya sebut **lima** gugus **ciri hakiki** negara **demokratis**: (1) Negara hukum; (2) pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat; (3) ada pemilihan umum berkala yang bebas; (4) prinsip mayoritas; (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar.⁵ Hanya apabila

semua ciri dan kondisi yang merincikannya terdapat, kita dapat bicara tentang demokrasi dalam arti modern.

[Sisipan: Orang dapat bertanya atas dasar apa lima gugus ciri itu dapat dianggap tolok-ukur sah bagi adanya pemerintahan demokratik. Jawabannya ialah bahwa demokrasi modern bukanlah konstruk teoretis etika politik yang secara apriori deduksi dari prinsip-prinsip etis yang lebih mendasar. Demokrasi adalah bentuk pengorganisasian pemerintahan yang berkembang secara empiris dan historis selama beberapa waktu. Bisa saja ada bentuk-bentuk lain. Tetapi inilah yang di zaman sekarang disebut demokrasi. Jadi empat gugus itu merupakan deskripsi empiris dari apa yang oleh para pakar dan menurut hemat saya juga oleh sebagian terbesar masyarakat yang mengetahui permasalahannya pada umumnya dimengerti apabila mendengar kata demokrasi. Makalah ini bukan tentang demokrasi secara abstrak, melainkan mengenai binatang itu yang disebut demokrasi modern.^{6]}

AKAR-AKAR DEMOKRASI MODERN

Meskipun ada tradisi-tradisi demokratis dalam banyak masyarakat tradisional di seputar bumi, terutama di tingkat desa, demokrasi modern dalam arti yang saya jelaskan di atas tidak dapat diragukan berasal dari tradisi Eropa Barat dan Amerika Utara, jadi dari "Barat". Munculnya demokrasi modern berkaitan secara hakiki dengan keruntuhan struktur-struktur feodal Abad Pertengahan, dengan cita-cita Pen-

cerahan Budi, dengan rasionalisme, individualisme, sekularisasi dan terutama dengan cita-cita Revolusi Perancis: kebebasan, kesamaan, persaudaraan. Dari sumber-sumber itu muncullah keyakinan modern bahwa semua orang sama martabatnya, bahwa mereka, oleh karena itu, memiliki hak sama atas partisipasi dalam menentukan arah komunitas mereka, bahwa tidak ada orang yang memiliki hak ilahi untuk memerintah orang-orang lain, jadi bahwa segala kekuasaan yang sah harus berdasarkan pemberian oleh seluruh komunitas. Gagasan-gagasan itu dirangkum dengan sangat baik dalam faham Rousseau tentang kedaulatan rakyat. Sistem politik Inggris sesudah The Glorious Revolution tahun 1689, lahirnya Amerika Serikat [yang belum dianggap kemenangan "demokrasi", melainkan kemenangan cita-cita republikan] dan perkembangan konstitusional yang kacau selama Revolusi Perancis tahun 1789-1795 amat penting dalam mengalirkan cita-cita kedaulatan ke dalam wadah-wadah institusional.

Munculnya cita-cita demokratis secara hakiki berkaitan dengan penolakan privilese-privilese feodal dan kekuasaan mutlak raja atas nama rasionalisme dan liberalisme. Penolakan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari munculnya sebuah kelas sosial baru sejak dari abad ke-16, borjuasi. Borjuasi makin lama makin menjadi tulang punggung negara nasional yang muncul. Kapitalisme dan revolusi industri meningkatkan lagi peran kunci borjuasi sebagai penunjang negara mereka.

Penuh kepercayaan diri dan optimisme borjuasi menuntut, dan akhirnya memperoleh, bagian dalam penentuan arah negara-negara mereka. Demokrasi modern adalah anak **keruntuhan masyarakat tradisional**, struktur-struktur sosialnya maupun kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilainya. Jadi munculnya demokrasi modern tidak dapat dipisahkan dari keruntuhan masyarakat **feodal** dan munculnya masyarakat **industrial, rasional** dan **borjuis**. Demokrasi merupakan **hasil logis** munculnya masyarakat modern.

Akan tetapi asal-usul demokrasi modern itu jangan membuat kita terhadap kenyataan bahwa akar-akar filosofis demokrasi menjalar ke zaman-zaman jauh lebih dulu. Saya tidak pertama-tama mengacu pada demokrasi Yunani yang memberikan nama kepada demokrasi, meskipun demokrasi sebagai alternatif politik hampir senantiasa ada dalam fikiran para filosof politik Barat justru karena mereka membaca Thukydides, Platon atau Aristoteles. Akan tetapi tidak ada garis lurus dari demokrasi langsung Yunani ke demokrasi representatif modern. Premis-premis dasar demokrasi sudah ditemukan jauh lebih dulu, bahkan sebelum Yunani masuk panggung dunia 2700 tahun lalu. Demokrasi modern merupakan hasil suatu perubahan dalam pengertian diri manusia yang membutuhkan ribuan tahun sampai, di ambang modernistas, perubahan itu akhirnya masuk ke dalam kesadaran para filosof dan pemikir politik. Perubahan pemahaman diri manusia itu, seperti

sering, secara mendalam berhubungan dengan pengertian baru tentang Allah.

Permulaannya di fajar sejarah, hampir 4000 tahun lalu, dengan Abraham. Pengalamannya dengan Jahweh yang diperdalam melalui pengalaman-pengalaman bangsa Israel membuka pengertian akan transendensi Allah, sebagai pencipta dunia dan umat manusia. Berhadapan dengan Allah transenden perbedaan-perbedaan antara manusia menjadi tidak hakiki. Perbedaan-perbedaan sangat nyata antara pria dan wanita, orang bebas dan budak, tuan dan abdi, dan di antara kelas-kelas sosial pada umumnya difahami sebagai tidak relevan terhadap martabat mereka sebagai manusia. Di hadapan Allah semua orang sama, kecuali situasi personal mereka. Ini sangat berbeda dari kerangka acuan religius di mana realitas duniawi difahami sebagai lingkaran konsentrik emanasi dari kekuatan-kekuatan alam gaib. Ketidaksamaan merupakan implikasi logis pandangan dunia semacam itu karena Yang Ilahi menyebar dalam lingkaran-lingkaran kepadatan yang berbeda. Juga tidak ada perbedaan tajam antara manusia dan binatang sebagaimana dapat kita saksikan dalam lakon-lakon wayang Jawa.

Jadi kepercayaan Israel kepada Yahweh, Tuhan sejarah, menghasilkan faham kekuasaan politik di mana raja hanyalah manusia saja, sama dengan setiap orang lain. Kepercayaan ke dalam transendensi Allah -yang juga menjadi batu sendi dua agama Abrahamistik lain, kristianitas ["Tidak ada orang Yahudi

atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus" Gal. 3,28] dan Islam- tidak memberikan ruang bagi dewa-raja, ya raja-dewa, atau bagi kekuatan-kekuatan ilahi raja. Di surga, menurut tiga agama itu, tidak akan ada perbedaan antara raja dan pengemis, dua-duanya akan diadili menurut nilai mereka dalam mata Allah. Itulah sebabnya nabi-nabi Yehuda kuno dan Israel berani menantang raja-raja mereka apabila mereka itu mengkhianati iman mereka atau membiarkan ketidak-adilan merajalela, Petrus dan Yohanes mengatakan kepada para pemimpin Yahudi di Yerusalem bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada atasan manusia [Kis. 4, 19; 5,29], dan ulama-ulama Muslim berulang kali berkonflik dengan raja-raja mereka, misalnya raja-raja Mataram di Jawa di abad ke-17.

Diperlukan keruntuhan tatanan feodal Abad Pertengahan dan pandangan dunianya yang hirarkis dulu, baru pandangan tentang manusia yang secara hakiki egalitarian itu dapat menjadi operasional secara politis. Akan tetapi sangat pentinglah asal-usul religius dan filosofis itu diingat. Jadi faham dasar martabat manusia, kesamaan hakiki semua orang dalam martabat itu, dan oleh karena itu perlunya kekuasaan politik memiliki legitimasi rasional bukanlah sesuatu yang secara spesifik "Barat". Faham-faham itu berasal dalam sebuah lingkungan yang sekurang-kurangnya merangkum seluruh dunia Ya-

hudi, Kristen dan Islam. Maka cita-cita demokratis bukanlah 100% merupakan anak pemikiran Pencerahan Budi. Pendasarannya dalam pandangan dasar tentang apa itu manusia jauh lebih luas daripada apa yang diperlihatkan oleh rupa Barat demokrasi modern. Yang memberikan wajah khas Barat kepada demokrasi adalah kenyataan bahwa dasar-dasar filosofisnya baru menjadi operasional secara sosial dan politik sesudah munculnya masyarakat pasca-tradisional yang karena alasan-alasan yang tidak perlu saya masuki di sini secara historis terjadi dalam apa yang kita sebut "Barat" [bersama dengan segala dominasi Barat kolonial dan pasca- kolonial].

KRISIS LEGITIMASI DEMOKRATIS

Namun apa pun dasar-dasar filosofis demokrasi, tidak dapat diragukan bahwa demokrasi Barat bagi dunia menjadi barang ekspor ideologis kebudayaan politik Barat yang paling mencolok. Dan justru karena klaim legitimasinya yang begitu luas ia terbuka terhadap tuduhan etnosentrisitas. Untuk dapat mengevaluasi klaim demokrasi itu, saya ingin masuk sedikit ke masalah etnosentrisitas itu.

Barangkali berguna kalau diperhatikan bahwa tidak seluruh kritik demokrasi bebas dari pamrih. Penolakan reform-reform demokratik dengan alasan "demokrasi Barat" sering datang dari mereka yang duduk dalam pemerintah. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok oposisi -apabila mereka sanggup untuk mengungkapkan diri; sering mereka justru dibung-

kamkan dengan argumen bahwa "oposisi" adalah ciri khas "demokrasi Barat" dan oleh karena itu tidak dapat diterima,- LMS-LMS, kelompok-kelompok hak-hak asasi manusia dan banyak kaum inteligensia dalam negara yang sama menyuarakan sikap-sikap cukup berbeda tentang demokrasi. Juga terdapat pandangan politik yang sangat berbeda-beda. Selama 20 tahun pertama Kemerdekaan Indonesia Presiden Sukarno dengan suara keras mendakwa "demokrasi Barat" sebagai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan sengaja tak pernah membedakan antara "**demokrasi**" dan "**demokrasi Barat**" [yang dikritik Hatta sebagai "**demokrasi liberal**" itu sesuatu yang lain: yaitu kenyataan bahwa di Barat demokrasi terbatas pada bidang politik, tetapi tidak mengenai bidang ekonomi yang dikuasai oleh kaum kapitalis, sebuah minoritas, jadi tidak bersifat demokratis, dan dengan demikian membatalkan keuntungan demokrasi politik - yang didukungnya tanpa reserve].

Akan tetapi dalam kenyataan demokrasi tidak begitu berhasil di luar negara-negara "Barat", selain di India, Sri Lanka, Malaysia dan Jepang [dan demokrasi Jepang selalu khusus]. Di Amerika Latin demokrasi pasang surut. Di Asia setiap negara harus dilihat sendiri-sendiri. "Cerita sukses" seperti Korea Selatan dan Taiwan berkembang dengan baik di bawah resim-resim otoriter, akan tetapi semakin bergerak ke arah demokrasi,

sedangkan Singapura tetap otoriter dan makmur. Dan seterusnya dan seterusnya.

Mari kita melihat beberapa dari kesulitan-kesulitan itu. Saya mengandaikan bahwa dalam banyak negara masyarakat, karena tradisi-tradisi mereka, barangkali jauh lebih senang apabila negara mereka dipimpin secara otoriter oleh seorang pemimpin dengan gaya kebapaan daripada harus terus menyaksikan pertengkaran antara partai-partai politik. Sering kali, seperti misalnya dalam Indonesia tahun 50-an, partai-partai politik tidak mampu untuk mengatasi kepentingan partai dan untuk mengungkapkan dengan terang kepentingan nasional. Sering kali budaya pengelolaan konflik sangat berbeda dari cara yang demokratis. Konflik terbuka bisa dianggap pantangan. Faham "oposisi setia Paduka Yang Mulia Sang Ratu" adalah asing di banyak kebudayaan: kritik terbuka sering dipandang sebagai langkah pertama pemberontakan. Partai-partai politik dapat mempertajam perpecahan-perpecahan primordial, etnik atau religius sedangkan sebuah resim yang otoriter-lunak dapat menentramkannya.

JELAJAH KE ETIKA POLITIK

Oleh karena itu serta merta menuntut demokratisasi nampak kurang bijaksana dan realistik. Namun anggapan ini memiliki relevansi spesifik dari sudut pandang etika politik. Salah satu prinsip etika politik mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan normatif hanya boleh diajukan apabila kondisi-kon-

disi bagi penerapannya sudah terdapat. Menyimpulkan kewajiban politik, seperti misalnya untuk menciptakan demokrasi, langsung dari prinsip-prinsip etis menurut Prof. Otfried Höffe merupakan suatu "kesalahan normativistik": menyimpulkan apa yang harus dilakukan langsung dari prinsip-prinsip normatif.⁷

Jadi dari sudut pandang etika politik, meskipun dalam kondisi-kondisi modern demokrasi merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya, tak ada suatu kewajiban mutlak untuk mengintrodusir demokrasi. Ada kewajiban-kewajiban lebih dasariah yang harus dipenuhi oleh negara, terutama menjamin kebutuhan paling dasar masyarakat seperti perdamaian dan keamanannya, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perawatan medis, serta jaminan hukum. Apabila kondisi-kondisi pemerintahan demokratis tidak terdapat, mencoba mengintrodusir demokrasi akan membahayakan kadar keamanan dan kesejahteraan yang sudah tercapai, dan itu berarti bahwa mencoba mengintrodusir demokrasi dalam kondisi-kondisi seperti itu secara etis salah. Apakah kondisi-kondisi perkembangan demokratis sudah terdapat bukan pertanyaan etis, melainkan empiris, yang harus pertama-tama diputuskan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kedua, perlu diperhatikan bahwa demokrasi merupakan faham yang kontekstual dan dinamis. Kontekstualitas⁸ di sini berarti: Bagaimana unsur-unsur hakiki demokrasi -negara hu-

kum, pemerintah di bawah kontrol masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, hak-hak demokratis dasar- harus diinterpretasikan dan direalisasikan secara praktis tergantung dari konteks politik, sosial, ekonomis dan kultural. Demokrasi tidak berarti sistem Inggris atau Eropa atau Amerika Utara. Demokrasi berarti proses- proses melembaga yang dalam kondisi-kondisi yang terdapat, secara paling baik merealisasikan lima gugus ciri pemerintahan demokratis itu.

Kontekstualitas faham demokrasi itu perlu terus menerus diingat kalau kita yakin tentang klaim universal demokrasi. Purisme demokratis barangkali tidak suka dengan itu, akan tetapi dari sudut pandang etika politik tak ada unsur hakiki demokrasi yang boleh diterjemahkan ke dalam realitas politik tanpa perhatian bagi konteks sosial, politik, ekonomis dan kultural. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana mengembangkan sistem multi-partai, apakah, misalnya, kedudukan hegemonikal partai pemerintah dapat diterima, apakah angkatan bersenjata boleh memainkan peranan khusus dalam kehidupan demokratis sebuah bangsa, atau bagaimana kebebasan pers harus diartikan - semua pertanyaan itu harus diputuskan dengan mempertimbangkan bagaimana dampaknya pada kemampuan negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan pada perkembangan demokrasi selanjutnya.

Perhatian terhadap kontekstualitas itu terutama penting dalam semua kebudayaan bukan Barat oleh karena tradisi-

tradisi sangat berbeda yang telah terbatinkan secara mendalam mengenai hirarki, kekuasaan politik, pola komunikasi, kelakuan berbudaya, pengungkapan dan pengelolaan konflik.⁹ Demokrasi sebagai prinsip legitimasi politik tidak membenarkan sikap yang mengabaikan struktur-struktur itu. Jadi institusi-institusi demokratis harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai komunitas-komunitas politik yang bersangkutan. Ini merupakan perintah etika politik -yang menetapkan dalam arti apa demokrasi memiliki, dan tidak memiliki, legitimasi eksklusif- dan tuntutan akal sehat. Struktur-struktur demokratis yang tidak jalan tidak masuk akal secara demokratis juga.

Tetapi di samping kontekstual, konsep demokrasi juga secara hakiki bersifat dinamis. Maksud saya, demokrasi tidak pernah selesai "jadi". Saya mengutip MacIver: "Democracy is a form of government that is never completely achieved. Democracy grows into its being."¹⁰

Jadi demokrasi selalu berkembang. Demokrasi berkembang dalam masyarakat-masyarakat Barat di mana rupanya bahaya terbesar bagi demokrasi adalah bahwa ia dianggap sudah barang tentu, bahwa orang menjadi bosan dengan "sistem", atau merosot menjadi sikap "saya membayar pajak dan karena itu saya berhak menikmati pelayanan negara", tanpa melibatkan diri sendiri [itulah latar belakang seruan makin keras orang seperti Charles Taylor dan Alasdair MacIntyre¹¹ agar kita kembali ke keutamaan-keutamaan republik-

an]. Akan tetapi struktur-struktur demokrasi terutama berubah dalam negara-negara dengan tradisi-tradisi bukan Barat, karena semua negara itu berada di tengah-tengah proses terus menerus perubahan sosial di mana struktur-struktur tradisional diganti atau diartikan kembali oleh kekuatan-kekuatan modernitas dan globalisasi. Di Indonesia misalnya situasi tahun 1995 berbeda bukan hanya dari tahun 1945 di mana perjalanan ke dalam Kemerdekaan di mulai, atau dari tahun 1959 di mana demokrasi parlementer berakhir, tetapi juga dari tahun 1973 di mana struktur-struktur politik khas "Orde Baru" sudah selesai terwujud. Alasan-alasan baik untuk mengerem proses demokratisasi 20 tahun kemudian barangkali tidak begitu baik lagi. Keseluruhan masyarakat berkembang pesat selama 20 tahun itu, untuk sebagian terbesar justru karena struktur-struktur dari lebih dari 20 tahun lalu itu, akan tetapi hal itu berarti bahwa sudah muncul konteks baru dan bisa saja dipertanyakan apakah struktur-struktur demokratis yang sudah berumur lebih dari 20 tahun itu, yang dipasang pada permulaan Orde Baru, masih sesuai dengan kondisi-kondisi sosial dan kultural yang terdapat sekarang.

Jadi tidak ada sesuatu seperti "demokrasi maksimum". Struktur-struktur yang pernah merupakan struktur-struktur kebebasan demokratis dan kondusif ke perkembangan demokrasi selanjutnya dapat, apabila tidak dikembangkan, menjadi struktur-struktur penindasan 20 tahun kemudian, karena me-

reka kehilangan kontekstualitasnya. Selalu ada kemungkinan untuk meningkatkan lagi isi demokratis kehidupan politik.

Oleh karena itu demokrasi pada umumnya tidak dapat dipaksakan dari luar [**contoh** yang membuktikan kemungkinan kebalikan adalah Jepang]. Ada negara-negara yang sama sekali tidak memiliki prasyarat-prasyarat demokrasi. Di kebanyakan negara demokrasi kiranya merupakan kemungkinan nyata, namun jangka panjang, tetapi tidak dapat dipaksakan kepada mereka, dan pasti tidak masuk akal untuk menuntut secara abstrak agar demokrasi diadakan dalam bentuk yang diambil dari pengalaman Barat. Apakah struktur-struktur demokratis minimal di sebuah negara merupakan maksimum yang nyata-nyata mungkin, ataukah struktur-struktur minimal itu merupakan sarana penindasan sebuah elit politik yang takut kehilangan kendali kekuasaan, dan bagaimana dalam konteks tertentu lima gugus unsur-unsur hakiki demokrasi harus direalisasikan, atau bentuk pemerintahan mana yang paling sesuai dalam konteks sebuah budaya spesifik, semua pertanyaan itu tidak dapat dijawab oleh etika politik. Mereka merupakan bahan sah diskursus politik semua pihak yang terlibat [di mana, tentu, masalah terletak dalam kenyataan bahwa diskursus politik sendiri tidak jalan di mana demokrasi dikekang].

KLAIM UNIVERSAL DEMOKRASI

Sekarang saya mau kembali ke pertanyaan pokok tulisan ini: Bagaimana halnya **klaim demokrasi** atas legitimasi univer-

sal? Hal yang menentukan adalah faham demokrasi. Apabila demokrasi difahami secara naif sebagaimana ia berkembang di Barat, klaim universalitas tidak dapat dipertahankan. Akan tetapi jawaban akan berlainan apabila kontekstualitas dan sifat dinamis faham demokrasi diperhatikan.

Pertama, meskipun demokrasi sebagai sistem kekuasaan politik pertama kali terbentuk di dunia Barat, pasca-tradisional dan dalam bentuk itu tidak begitu saja dapat dipindahkan ke dalam lingkungan-lingkungan budaya yang sangat berbeda, namun gagasan dasar demokrasi, yaitu kesamaan hakiki antara manusia, berakar jauh- jauh di zaman pra-modern, dalam pengertian manusia yang terwujud sebagai akibat pertemuannya dengan Allah yang transenden melalui agama Israel, Kristiani dan Islam. Akan tetapi kesamaan dasariah antara manusia juga merupakan nilai dalam budaya-budaya lain. Di Afrika sub-Sahara manusia dianggap secara hakiki sama martabatnya, suatu pandangan yang terungkap a.l. dalam hubungan erat antara komunitas mereka yang hidup dan nenek-moyang mereka yang telah meninggal. Bahkan hal yang sama dapat dikatakan apabila kita memandang kebudayaan Jawa secara lebih mendalam padahal kebudayaan Jawa di permukaannya kelihatan sangat feodalistik dan tidak berkesamaan. Ada dua unsur yang menunjuk pada keyakinan tentang kesamaan antar manusia yang lebih mendalam. Pertama, faham Jawa tentang kesatuan hamba Tuhan [manunggaling kawula Gusti]

yang mengungkapkan hubungan antara manusia dan Allah, yang mengatasi segala derajat feodal; faham itu terbuka bagi siapa saja, dan di mana kesatuan itu telah tercapai tidak ada lagi perbedaan antara raja dan orang biasa. Kedua, dalam wayang Purba para punakawan, para abdi ksatriya-ksatriya luhur, kalau dilihat secara lebih mendalam, ternyata merupakan pamong mereka dan para ksatria, dilihat dari perspektif ini, tidak lebih daripada anak yang di-baby-sit oleh para panakawan, hal mana secara implisit berarti bahwa ksatriya luhur pun hanya manusia seperti semua orang lain.

Ada hal kedua. Seandainya sekarang masih ada sistem tradisional non-demokratis yang berkuasa, tentu tidak ada dasar untuk menuntut agar sistem itu diubah menjadi demokrasi. Akan tetapi hampir semua satuan politik di seluruh dunia dewasa ini menganggap diri sebagai negara modern. Dan sebagai itu mereka tidak lagi memperoleh pengakuan tradisional meskipun sikap-sikap tradisional terhadap penguasa masih mewarnai cara mereka berkomunikasi. Sebagai contoh dapat diambil India. Seorang outsider barangkali memperkirakan bahwa sistem kasta yang masih sangat kuat dan kaku mesti merupakan halangan terhadap demokrasi yang tak teratasi. Akan tetapi dalam kenyataan India dapat melihat kembali atas lebih dari 40 tahun pemerintahan demokratis yang tak putus-putusnya. Nampaknya kenegaraan India, sebagai puncak India yang modern dan baru, tidak dihubungkan dengan pandang-

an-pandangan sosial tradisional dan hal itu bukannya mengacaukan kehidupan masyarakat melainkan sebaliknya rupa-rupanya merupakan pengalaman alternatif yang justru diharapkan dan dibutuhkan terhadap tradisi-tradisi sosial India.

Jadi kenegaraan modern menjadi penggerak ampuh keyakinan-keyakinan mendalam tentang kesamaan dan martabat manusia. Dalam banyak kebudayaan di seputar bumi keyakinan itu mempunyai dasar empiris sosial dalam desa tradisional dengan "demokrasi desanya" di mana kesamaan dihayati sebagai nilai tinggi.¹² Sebagaimana dicatatkan oleh Mohammad Hatta, meskipun demokrasi berbeda dari demokrasi desa, akan tetapi demokrasi desa menjadi pengalaman yang merupakan latar belakang usaha untuk mengantar masyarakat yang masih hidup dalam lingkungan sosial tradisional ke dalam alam demokrasi modern.¹³

Lalu ada masalah kebebasan. Memang benar bahwa tak ada kebudayaan tradisional di mana kata "kebebasan" menikmati kedudukan istimewa. Kebebasan pertama kali menjadi faham yang memiliki kekuatan sosial dengan Martin Luther yang mendasarkan diri pada "kebebasan orang Kristen", yaitu hak masing-masing orang Kristen untuk membaca serta mencari sendiri arti Kitab Suci, melawan hirarki Katolik [dalam kenyataan "kebebasan" pertama kali dipermaklumkan sebagai nilai terpenting dalam beberapa republik kota Italia abad ke-13¹⁴].

Dalam negara-negara seperti Indonesia kita sering mendengar bahwa kebebasan Barat "liberal" berbau individualisme dan asing bagi kebudayaan-kebudayaan Timur. Akan tetapi pernyataan ini tidak dapat bertahan kalau diperiksa dari lebih dekat. Bukan hanya daya tarik faham kemerdekaan bagi orang biasa masih sangat besar, meskipun perjuangan demi kemerdekaan dari kekuasaan kolonial sudah lama berakhir. Melainkan kemerdekaan dalam kenyataan merupakan salah satu nilai sosial manusia yang paling dasariah. Bukan kebebasan dalam arti abstrak, sebagai semacam anarki. Melainkan dalam arti kebebasan dari penderitaan, perasaan takut dan penindasan, sebagai kebebasan dari campur-tangan sewenang-wenang pemerintah, misalnya dari ancaman diusir dari tempat tinggalnya demi proyek pemerintah, sebagai kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai komunitasnya sendiri, sebagai kebebasan untuk berusaha mencapai pola kehidupan yang terasa bermutu. Dan seterusnya. Jadi meskipun kerinduan akan kebebasan itu tidak langsung berkaitan dengan demokrasi modern, kerinduan itu menunjukkan bagaimana nilai-nilai dasar demokratis kesamaan dan kebebasan merupakan nilai-nilai orang biasa dalam masyarakat-masyarakat non-Barat juga.

Dalam kenyataan, klaim demokrasi atas legitimasi universal berdasarkan kenyataan bahwa sesudah legitimasi-legitimasi kekuasaan politik seperti monarki tidak lagi dipercayai, rupa-rupanya tak ada alternatif positif terhadap demokrasi.

Apabila privilese-privilese individu kuat atau kelas-kelas berkuasa tradisional tidak lagi dipercayai, kekuasaan atas manusia-manusia hanya mungkin legitim apabila berdasarkan konsensus orang-orang itu. Jadi satu-satunya dasar legitimasi politik adalah kedaulatan rakyat, bukan saja sekedar sebagai semboyan yang dikooptasi oleh segala macam resim populistik atau perwalian, melainkan dalam arti nyata, substansial, dan inilah apa yang dimaksud dengan demokrasi: Faham sebuah sistem kekuasaan yang melembagakan, dalam kadar tertinggi yang secara realistik dapat tercapai, kedaulatan rakyatnya, jadi kekuasaannya di atas pemerintah.

Sebagaimana telah kita lihat, sering sekali demokrasi bisa saja tidak merupakan opsi yang realistik. Dalam banyak kasus adanya administrasi pusat yang mampu untuk menjamin tingkat minimal keamanan umum, hukum dan keteraturan sudah merupakan prestasi sangat tinggi dan bahkan keteraturan minimal itu masih belum dapat tercapai oleh banyak negara. Akan tetapi kecuali sangat sedikit negara yang masih secara mendalam berakar dalam tradisi, situasi kacau semacam itu, bahkan segala situasi bukan demokratis, tidak pernah dijunjung tinggi sebagai nilai pada dirinya sendiri, sebagai alternatif positif terhadap demokrasi, sebagai model tepat untuk melembagakan kekuasaan. Resim-resim itu sah, akan tetapi by default. Dasar kekuasaan politik mereka bersifat pragmatis

dalam arti bahwa mereka berusaha sebaik mungkin, akan tetapi legitimasi mereka tidak lestari dan tidak biasa.

Jadi demokrasi jauh lebih daripada sebuah produk Barat yang ditawarkan sesudah keambrokan kolonialisme. Dalam konteks pasca-tradisional semua bentuk kekuasaan non-demokratis, meskipun barangkali memiliki legitimasi pragmatis, sebenarnya bersifat sewenang-wenang dan tidak memiliki pendasaran etis yang mencukupi karena hanya berdasarkan kemampuan elit yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Apabila tidak ada demokrasi, kekuasaan politik hanya berdasarkan kemampuan para penguasa untuk memaksakan kekuasaan mereka. Situasi seperti itu kurang memiliki legitimasi dan cukup berbahaya karena stabilitas politik hanya dapat berasal dari pengakuan bebas para warga negara. Stabilitas politik lestari nampaknya tergantung dari perkembangan struktur- struktur demokratis yang sesuai dengan ciri sosial dan kultural bangsa yang bersangkutan. Dan itulah, dalam kondisi pasca-tradisional, nampak berlaku secara universal.

CATATAN-CATATAN

- 1 John Dunn (ed.), *Democracy. The Unfinished Journey. 508BC to AD 1993*, Oxford: Oxford University Press, 1992.
- 2 Robert A. Dahl, *Democracy and its Critics*, New Haven/London: Yale University Press., 1989, 213.
- 3 Barangkali kita masih ingat "dunia kedua" almarhum: kalau Lenin, sama dengan Karl Marx, secara terbuka menertawakan demokrasi, cucu-cucunya yang bersosok lebih kecil terpaksa menghias diktatur-diktatur lusuh mereka dengan sebutan aneh "demokrasi rakyat" (dan di negara ini, lebih tolok lagi, masih juga ada yang menyebutkan "demokrasi

rakyat* itu di antara bentuk-bentuk demokrasi] - padahal diktatur-diktatur itu memiliki legitimasi tinggi berdasarkan ideologi komunis mereka sendiri.

4 Lihat kutipan pada permulaan.

5 Lima gugus ciri negara demokratis tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Negara hukum berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Tuntutan ini dapat dirinci dalam lima ciri negara hukum:
 - 1) Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar.
 - 2) Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling dasar.
 - 3) Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
 - 4) Terhadap tindakan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
 - 5) Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.
- (2) Kontrol efektif terhadap pemerintah memuat:
 - 1) Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil.
 - 2) Pemerintah berada, serta bersedia berada, di bawah sorotan terus menerus baik Badan Perwakilan Rakyat maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain.
 - 3) Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.
 - 4) Pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa persetujuan Badan Perwakilan Rakyat.
 - 5) Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.
- (3) Lembaga pemilihan umum dapat dirinci sbb.:
 - 1) Ada pilihan antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai.
 - 2) Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih.
 - 3) Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih.
 - 4) Melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama dengan pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah.
- (4) Dengan prinsip mayoritas dimaksud bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sefakat atau, kalau kesefakatan tidak tercapai, dengan suara terbanyak.
- (5) Hak-hak dasar demokratis rakyat yang perlu diakui dan dijamin oleh negara demokratis adalah:

- 1) Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis; hak ini termasuk kebebasan pers.
 - 2) Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah.
 - 3) Hak berkumpul.
 - 4) Hak membentuk serikat, termasuk partai politik, dan hak berasosiasi.
6. Saya menyaring lima gugus ciri-ciri hakiki demokrasi itu dari sumber-sumber berikut: Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia 1977; Robert A. Dahl, *Democracy and its critics*, New Haven/London: Yale University Press 1989; Affan Gaffar 1993, "Demokrasi Politik" makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945, 8s.; G. Gingham Powell Jr. 1992, *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press (yang saya ambil dari Affan Gaffar 1993, 5s.); Sri Sumantri 1993, "Demokrasi Hukum", makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945; Sutor 1991; Reinhold Zippelius 1973, *Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft*, München: C.H. Jack Lively 1975, *Democracy*, Oxford: Basil Blackwell; C. B. Macpherson 1977, *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford: Oxford University Press.
7. Otfried Höffe, *Sittlich-politische Diskurse. Philosophische Grundlagen, Politische Ethik, Biomedizinische Ethik*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981, 16; Sutor 1991, 11, memulai bukunya tentang etika politik dengan "tesis dasar ... bahwa kebijakan politik selalu harus memadai dengan tolokukur-tolokukur etis, akan tetapi tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan prinsip-prinsip itu." Bagi etika politik berlaku apa yang berlaku bagi etika pada umumnya: "Sebuah situasi tidak dapat ditentukan secukupnya secara normatif. Pertanyaan, apa yang harus kulakukan, tidak dapat dijawab dengan kesimpulan logis dari prinsip-prinsip dan norma-norma", ib. 46.
8. Kontekstualitas itu ditegaskan oleh Otfried Höffe, *Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1989, 480.
9. Mochtar Buchori dalam bukunya "Sketches of Indonesian Society" (Jakarta: Jakarta Post/IKIP-Muhammadiyah Jakarta Press 1994, 74, 77) memakai kesempatan pernyataan salah satu dari VIP kita bahwa "every drive toward greater openness and more democracy in our society should be carried out in a polite way" untuk menegaskan bahwa "combining the drives toward democracy and politeness or civility will enable us to transform ourselves into a democratic society without experiencing excessive and uncontrollable social tensions". Dengan lain perkataan menurut Mochtar Buchori, promosi demokrasi di Indonesia hanya dapat berhasil apabila lawan politik tidak dipermalukan, terutama mereka yang berkuasa. Barangkali mudah untuk menertawakan pernyataan si VIP itu [yang namanya secara sopan tidak disebut oleh Mochtar Buchori]. Akan tetapi, tentu saja si VIP itu betul dan Mochtar Buchori pun betul dan mengatakan apa yang kita pikirkan tanpa perhatian pada perasaan mereka yang berkuasa [perasaan siapa? tentu perasaan mereka yang kita anggap penindas!] barangkali membuat kita merasa hebat sebagai pejuang demokrasi, akan tetapi tidak akan memajukannya.
10. Saya mengambil kutipun ini dari makalah Prof. Sri Sumantri yang saya sebutkan di atas; Dr. Nurcholish Madjid menegaskan hal yang sama: "Demokrasi ... tidak dapat didefinisikan 'sekali untuk selamanya', dalam Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi. Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Wakaf Paramadina, 1994, 134 s.

- 11 Lih. misalnya Charles Taylor, "Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate", dalam: Nancy L. Rosenblum (ed.), *Liberalism and the Moral Life*, Cambridge, Mass./London England: Harvard University Press 1991, 159-182; Alasdair Macintyre, "Ist Patriotismus eine Tugend?", Axel Honneth (Ed.), *Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften*, Frankfurt/New York: Campus 1993, 84- 102, aslinya: "Is Patriotism a Virtue?" (The Lindley Lecture, University of Kansas, Dept. of Philosophy, 26.3.2984, 3-20).
- 12 Tentang nilai kesamaan di dewa lihat Robert R. Jay, *Religion and Politics in Rural Central Java*, New Haven: Yale University, 1963, 78 ss.
- 13 Mohammad Hatta 1932A, "Ke arah Indonesia Merdeka" [1932], dalam: Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia 1953, 61-80.
- 14 Lih. Quentin Skinner dalam: Dunn 1992, 66.

(Naskah untuk buku "percikan filsafat politik", atau khusus "HAM dan Demokrasi")

